



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN JATISAMPURNA
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Jatisampurna selama tahun anggaran 2025, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

LKIP ini berisi informasi mengenai latar belakang, pendahuluan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, serta profil Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Selain itu, laporan ini juga memuat pagu anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, capaian kinerja, serta realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya LKIP ini, diharapkan kinerja Kecamatan Jatisampurna dapat terus meningkat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini, baik melalui data, informasi, maupun saran yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kecamatan Jatisampurna serta menjadi bahan refleksi dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah demi kemajuan Kecamatan Jatisampurna.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Desember 2025

CAMAT JATISAMPURNA



NATA WIRYA, S.Sos., M.SI.

NIP. 197106152007011021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Manfaat
- 1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya
- 1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi Dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029
- 2.2 Rencana Startegis Kecamatan Jatisampurna
- 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatisampurna dan Perubahan Pada APBD Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja
 - A. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
 3. Presentase Wilayah Tertib
 - B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029
 1. Presentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik
 2. Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 RencanaTindak Lanjut



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna
2. Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Jatisampurna
3. Gambar 3. Peta Administratif Kecamatan Jatisampurna
4. Chart 3. Kontribusi Kuantitatif Masing-Masing Kegiatan Terhadap Capaian Indikator
5. Chart 4 Kontribusi Kuantitatif Masing-masing Program Terhadap Capaian Indikator



DAFTAR TABEL

- 1 Tabel 1.1. Jumlah Aparatur Kecamatan Jatisampurna Berdasarkan Status Kepegawaian
- 2 Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatisampurna
- 3 Tabel 1.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna
- 4 Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatisampurna 2024-2026
- 5 Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatisampurna 2025-2029
- 6 Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026
- 7 Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029
- 8 Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
- 9 Tabel 2.6 Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025
- 10 Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
- 11 Tabel 2.8 Lampiran Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
- 12 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2025
- 13 Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna
- 14 Tabel 3.3 Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, 2024 dan 2025
- 15 Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat
- 16 Tabel 3.5 Nilai IKM Tri Wulan I Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna
- 17 Tabel 3.6 Nilai IKM Tri Wulan II Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna
- 18 Tabel 3.7 Nilai IKM Tri Wulan III Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna
- 19 Tabel 3.8 Nilai IKM Tri Wulan IV Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna



- 20 Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025 dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran
IKM
- 21 Tabel 3.10 Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3
- 22 Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase
Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna
- 23 Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja
Sasaran Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan
Jatisampurna
- 24 Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025
- 25 Tabel 3.14 Kontribusi Unsur LKM Tahun 2025
- 26 Tabel 3.15 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM
Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik
- 27 Tabel 3.16 Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja Sasaran
Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik
- 28 Tabel 3.17 Perbandingan Akumulasi Capaian Kinerja Sasaran Presentase
LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik dengan Capaian Tahun
Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- 29 Tabel 3.18 hasil yang dicapai menunjukkan performa yang luar biasa
untuk tahun pertama periode Renstra baru
- 30 Tabel 3.19 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator
Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik
- 31 Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase LKM
yang mendukung pelayanan Publik
- 32 Tabel 3.21 Perhitungan Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di
Kecamatan
- 33 Tabel 3.22 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2025
- 34 Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Presentase
Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Lalu
- 35 Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator kinerja Sasaran Presentase
Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dengan Tahun Lalu
- 36 Tabel 3.25 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Target
Akhir 2025-2029
- 37 Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatisampurna
Presentase Peningkatan Kepuasa Masyarakat di Kecamatan dengan
Standar Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)
- 38 Tabel 3.27 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Persentase
Peningkatan Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2025



- 39 Tabel 3.28 Perbandingan Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Per Program Tahun 2024 dan Tahun 2025
- 40 Tabel 3.29 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna
- 41 Tabel 3.30 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 dilakukan berdasarkan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pengukuran dan pelaporan kinerja, yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja Kecamatan Jatisampurna sekaligus menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode selanjutnya.

Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi, khususnya bagi Kecamatan Jatisampurna. Periode ini menandai masa transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu peralihan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Laporan ini mencerminkan sejauh mana Kecamatan Jatisampurna mampu menjaga ritme kinerja di tengah perubahan visi-misi daerah seiring terpilihnya Kepala Daerah definitif. Fokus utama laporan ini adalah memotret realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kerja (PK) tahun berjalan.

Penyusunan LKIP ini berfungsi sebagai jembatan strategis untuk memastikan sinkronisasi antara target transisi dalam RPD dengan arah kebijakan baru dalam RPJMD. Kecamatan Jatisampurna berkomitmen agar peralihan kepemimpinan daerah tidak menghambat akselerasi pelayanan publik. Sebaliknya, laporan ini menjadi basis evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang, sehingga program prioritas kewilayahan tetap berkesinambungan dan semakin



akuntabel dalam kerangka SAKIP yang berorientasi hasil (result-oriented government).

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Publik

Menyediakan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatisampurna selama Tahun 2025.

2. Penilaian Capaian Strategis

Mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam merealisasikan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

3. Media evaluasi Transisi

Menilai efektivitas pelaksanaan dan kesinambungan program dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah, dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

4. Umpan Balik Perbaikan

Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan sebagai bahan masukan dalam



penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program, dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

B. Manfaat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. bagi Internal Kecamatan : sebagai bahan evaluasi kinerja secara mandiri dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas serta efektivitas pemanfaatan anggaran pada periode perencanaan berikutnya
2. Bagi Pemerintah Kota Bekasi : sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam perumusan kebijakan strategis serta pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
3. Bagi Masyarakat : sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

1.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Kecamatan Jatisampurna merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sebagai perangkat daerah, kecamatan memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan dikategorikan sebagai teritorial organization, dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berperan penting dalam dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional.



Kedudukan Kecamatan Jatisampurna dipimpin oleh Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Camat mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- 4) pengkoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 5) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- 7) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 8) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 10) pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- 11) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- 12) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

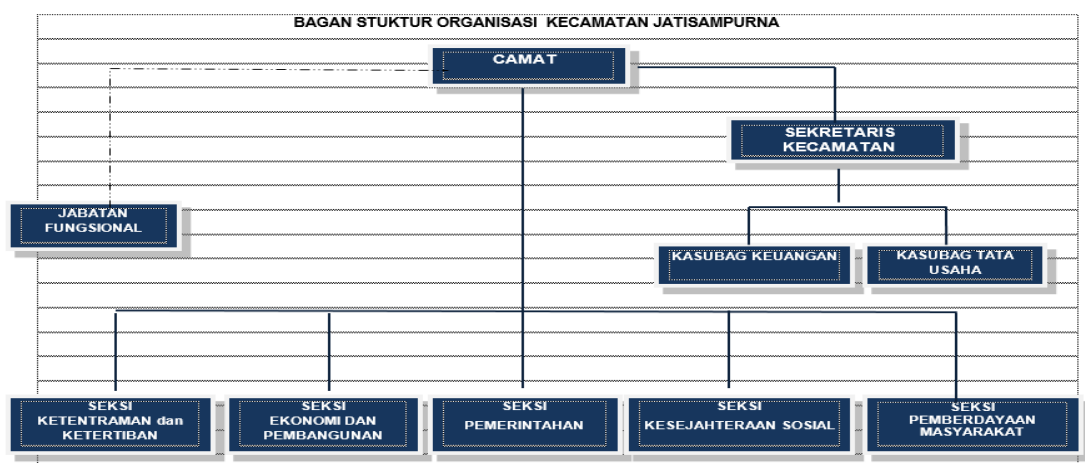
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 2) Seksi Pemerintahan;
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 6) Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban;
- 7) Lurah
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna disusun untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan teknis. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna, disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna



Kecamatan Jatisampurna terdiri dari 68 RW dan 348 RT, dengan sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perumahan. Keberagaman masyarakat yang tinggi di wilayah ini menuntut pemerintah



kecamatan dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) yang disediakan oleh pengembang perumahan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kecamatan Jatisampurna memiliki beberapa bidang utama dimana seluruh seksi ini berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Jatisampurna guna memastikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu:

- 1) Seksi Pemerintahan
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 5) Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan

1.5 Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target strategis, khususnya dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Jatisampurna didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang.

A. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatisampurna didukung oleh aparatur yang kompeten dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Jumlah keseluruhan aparatur Kecamatan Jatisampurna sebanyak 166 orang. Adapun komposisi aparatur berdasarkan status kepegawaian disajikan secara lebih rinci pada tabel berikut.



Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Kecamatan Jatisampurna Berdasarkan Status Kepegawaian

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	CAMAT	1	1			
2	SEKRETARIS KECAMATAN	1	1			
3	KASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN	1		1		
4	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN	1		1		
5	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	1	1			
6	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN	1		1		
7	KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	1		1		
8	KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN	1		1		
9	KASUBAG TATA USAHA KECAMATAN	1		1		
10	LURAH JATISAMPURNA	1		1		
11	LURAH JATIRADEN	1		1		
12	LURAH JATIRANGGA	1		1		
13	LURAH JATIRANGGON	1		1		
14	LURAH JATIKARYA	1	1			
15	SEKRETARIS KELURAHAN	4		4		



16	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN	4		4		
17	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN	5		5		
18	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM	5		5		
19	STAF PELAKSANA (PNS)	21		15	6	
20	STAF PELAKSANA (PPPK)	101		47	53	1
21	PPPK PARUH WAKTU	12				
TOTAL		166	4	90	59	1

Sumber data: Aplikasi SIAP Kota Bekasi Tahun 2025

Komposisi aparatur terdiri dari 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 101 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 12 PPPK paruh yang tersebar di Kantor Kecamatan serta 5 Kelurahan (Jatisampurna, Jatiraden, Jatirangga, Jatiranggon dan Jatikarya). Penerapan Budaya Kerja ASN “BerAKHLAK” menjadi landasan utama dalam menjaga nilai AKIP tetap tinggi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sebagai organisasi kewilayahan yang berperan mendekatkan jangkauan birokrasi kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan Jatisampurna diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatisampurna

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Gedung dan Bangunan	Unit	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	Buah	14	-		14



3	Kendaraan Roda 2	Buah	27	-	10	37
4	Komputer	Unit	70	14	30	114
5	Printer	Unit	44	2	52	98
6	Air Conditioner	Unit	25	3	3	31
7	Lemari	Unit	40	10	12	62
8	Meja	Unit	100	100	45	245
9	Kursi	Unit	314	150	150	614
10	LCD	Unit	1	-	-	1
11	Laptop	Unit	7	3	10	20
12	Scanner	Unit	2	1		3

Sumber : Data aset Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025

1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis

A. Aspek Strategis

Kecamatan Jatisampurna terdiri dari 68 RW dan 348 RT, dengan sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perumahan. Keberagaman masyarakat yang tinggi di wilayah ini menuntut pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) yang disediakan oleh pengembang perumahan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kecamatan Jatisampurna memiliki beberapa bidang utama dimana seluruh seksi ini berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Jatisampurna guna memastikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu:

- 6) Seksi Pemerintahan
- 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 9) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 10) Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan



Dalam pelaksanaan tugasnya, camat menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Wali Kota Bekasi, khususnya dalam aspek pembangunan di tingkat kecamatan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor fisik semata, tetapi juga pada aspek ketertiban, keindahan, dan kenyamanan (K3). Oleh karena itu, Kecamatan Jatisampurna berperan dalam menciptakan zona-zona K3 yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Kota Bekasi yang merupakan kota satelit DKI Jakarta, Kecamatan Jatisampurna memiliki peran penting dalam melayani warga kota yang semakin berkembang. Kecamatan ini harus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan warga, termasuk peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Berbagai tantangan muncul terkait manajemen perkotaan, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti kebersihan, transportasi, dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam mendukung visi Kota Bekasi, yaitu Nyaman dan Sejahtera, Kecamatan Jatisampurna secara khusus merespons melalui pelaksanaan misi pertama Kota Bekasi, yakni "Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Ini sangat relevan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi visi dan misi ini adalah peningkatan kapasitas pelayanan di tingkat kecamatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Salah satu upaya penting dalam meningkatkan pelayanan publik adalah penyederhanaan birokrasi, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan. Dengan letak geografis kecamatan yang dekat dengan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik dapat lebih mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya.



Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Kota Bekasi merupakan tugas yang kompleks dan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik dan sistematis yang berfokus pada aspek fundamental dan strategis. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan, guna mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi secara berkelanjutan.

B. Isu Strategis

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. berkaitan dengan pelayanan publik yang akan di Kecamatan Jatisampurna tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Secara Khusus, Identifikasi permasalahan dihadapi pada tahun 2025, antara lain :

1. Adanya keterbatasan kompetensi dan pemahaman pada pemangku jabatan dan aparatur Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dalam menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kurangnya komitmen yang tinggi dalam menerapkan wilayah tertib K3 di lingkungan Kecamatan Jatisampurna pentingnya komitmen dalam penertiban K3 berdampak pada peningkatan PAD Kota Bekasi;
3. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan prosedur administrasi yang panjang dan tidak efisien dalam mendapatkan layanan seperti KTP, KK. Dikarenakan masyarakat masih kurang mengerti tentang perkembangan teknologi informasi;
4. Ketertabatan infrastruktur pada jalan di wilayah Kecamatan Jatisampurna mengakibatkan kemacetan yang cukup parah, di



sebabkan oleh banyaknya kendaraan, dan kurangnya transportasi publik;

5. Kurangnya Pengelolaan Drainase dan keberlanjutan lingkungan yang tidak optimal di wilayah Kecamatan Jatisampurna maka di wilayah Kecamatan Jatisampurna sebagian mengalami Banjir yang cukup tinggi dikarenakan pengelolaan sampah yang buruk dapat menjadi masalah yang mempengaruhi kebersihan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatisampurna;
6. Kurangnya Fasilitas Sarana untuk wanita dan kemasyarakatan.

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Pada tahun 2025, Kecamatan Jatisampurna melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Program-program ini mencakup aspek administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketertiban umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana wilayah.

Tabel berikut merangkum program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2025:

Tabel 1.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna
Kota Bekasi Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
	Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	SKPD - Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pengadaan	Pengadaan Peralatan Mesin
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi



No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga - Evaluasi Kelurahan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiraden - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatisampurna - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatikarya - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiranggon - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatirangga - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatiraden, Jatisampurna, Jatiranggon, Jatirangga, dan Jatikarya
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025

D. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Proses ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan guna memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam rencana kinerja, ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang terdapat pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan secara selaras dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan berfungsi sebagai komitmen instansi untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan.

Perencanaan Tahun 2025 memiliki karakteristik strategis karena berada pada fase transisi fundamental dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Tahun ini menjadi titik temu antara berakhirnya kerangka Renstra Periode 2024–2026 dan dimulainya Renstra Periode 2025–2029 yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru.

Peralihan tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan proses sinkronisasi substansial untuk memastikan bahwa program dan kegiatan kecamatan tetap relevan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Melalui proses ini, dilakukan penajaman indikator kinerja, realokasi prioritas anggaran, serta penguatan fokus pada outcome pelayanan publik.

Pendekatan transisi yang terencana ini bertujuan menjaga kesinambungan pelayanan dan stabilitas pembangunan wilayah, sekaligus memastikan bahwa tidak terjadi kekosongan kebijakan maupun tumpang tindih program. Dengan demikian, Kecamatan tetap mampu

mempertahankan kinerja yang stabil sambil menyiapkan fondasi untuk akselerasi capaian pada periode perencanaan yang baru.

2.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian target makro Pemerintah Kota Bekasi, Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna secara substansial mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Visi Kota Bekasi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Gambar 2.1 Visi Kota Bekasi KOTA BEKASI



NYAMAN



SEJAHTERA

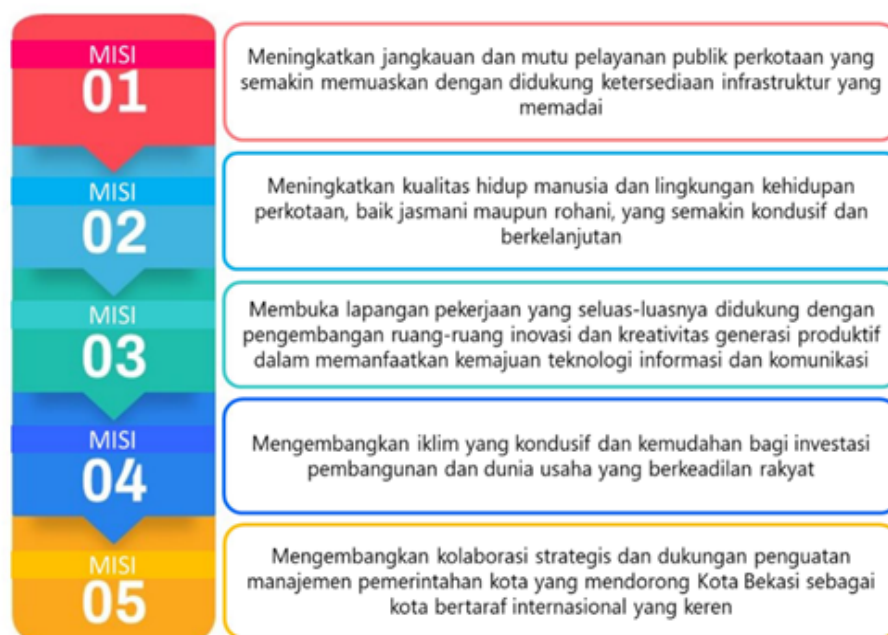
Sumber data : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Visi tersebut mengandung makna “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera.” Frasa “yang semakin” mencerminkan semangat pembaruan dan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan sehingga kondisi Kota Bekasi menjadi lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kata “Nyaman” menggambarkan kondisi kehidupan perkotaan yang kondusif, aman, dan tertata dengan baik. Lingkungan kota diharapkan bersih, asri, dan mendukung aktivitas masyarakat secara tenang dan produktif. Selain itu, tercipta pula suasana kehidupan sosial yang harmonis, di mana masyarakat dapat hidup rukun, saling menghargai,

serta bebas mengekspresikan nilai-nilai agama dan budaya dalam bingkai toleransi. Sementara itu, kata “Sejahtera” menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang berkualitas, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta didukung oleh akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang memadai. Dengan demikian, masyarakat Kota Bekasi diharapkan memiliki tingkat kesejahteraan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi, rumusan umum mengenai Upaya-Upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

1. Kecamatan Jatisampurna berperan aktif dalam mewujudkan Misi ke-1, yaitu : "*Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai*", dukungan ini



difokuskan pada :

- ❖ Tujuan ke-1 : Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.
- ❖ Sasaran .1.1 : Meningkatnya estetika kota di wilayah Kecamatan Jatisampurna yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur lokal yang modern.

2. Sejalan dengan upaya penguatan manajemen pemerintahan, Kecamatan Jatisampurna mendukung Misi ke-5, yaitu : *”Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”*. Dukungan ini difokuskan pada :

- ❖ Tujuan ke-5 : Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern dan inovatif.
- ❖ Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di tingkat kecamatan.

2.2 Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

Dalam masa transisi ini, Kecamatan Jatisampurna melakukan penyesuaian (*re-alignment*) terhadap target-target kinerja. Jika pada Renstra 2024-2026 fokus utamanya adalah peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, peningkatan ketertiban umum, maka pada Renstra 2025-2029, fokus dikembangkan pada peningkatan aktifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pemberian layanan publik dan peningkatan efektivitas pelayanan publik di wilayah kecamatan. Pengembangan fokus dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat dan Kota Bekasi dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting.

Perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029 disajikan 2 (dua) pada



tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Jatisampurna 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja		
					Sasaran tahun ke -		
					2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel		1.	Capaian Nilai Zona Integritas			
		1.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,50	75,7	76
		1.2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	85	85,3	85,5
2.	Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang Tertib dan Aman		2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum			
		Meningkatnya Ketertiban dan Ketertarikan Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat	2.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	31%	54%	77%

Sumber data : Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

**Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Jatisampurna 2025-2029**



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna		1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Nilai)					
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik (%)	62.5	65	67.5	68	70.5
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)	0.06%	0.12%	0.18%	0.24%	0.29%

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

A. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh informasi kinerja yang relevan dan diperlukan dalam pengelolaan manajemen kinerja yang baik.
- 2) Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan



Jatisampurna, digunakan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, Kecamatan Jatisampurna menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan jaminan penyediaan pelayanan publik guna melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk meningkatkan zona tertib, bersih, dan indah guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan serta menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, Kecamatan Jatisampurna menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2024-2026**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai	Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari	-Sub Bagian Tata Usaha -Sub Bagian	



	Kinerja Pemerintah	Pemerintah (AKIP)		kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Inspektorat	Keuangan -Seksi Ekbang -Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan -Seksi Kesos Kelurahan	
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Jatisampurna adalah masyarakat yang menerima	-Seksi Ekbang -Seksi Pemerintahan -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan	



					layanan.		
3	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung Oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Jatisampurna x 100%	-Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan -Seksi Trantib	

Sumber data : Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	62.5	65	67.5	68	70.5
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0.06%	0.12%	0.18%	0.23%	0.29%

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025

Berdasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026)

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra Kecamatan Jatisampurna 2024-2026 dan Renja Tahun 2025. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tabel 2.5 dan alokasi pertriwulan tabel 2.5

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna
Kota Bekasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	75,7
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	83,3
2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	54

Sumber data : Perjanjian Kinerja Esselon III Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna



Tabel 2.6 Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 130.000.000	PAD/DAU/ DANA KHUSUS
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.645.687.400	PAD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.054.241.480	PAD/DAU/DANA KHUSUS
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 456.000.000	PAD/DBH
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.000.000	PAD

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna

B. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Selanjutnya Perjanjian Kinerja pada Perubahan APBD Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna merupakan target kinerja sesuai dengan Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja tahun 2025. Target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.7, dan Alokasi Anggaran Pertriwulan Tabel 2.8.

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	62,5



	di Kecamatan Jatisampurna		
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0.06%

Sumber data : Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan 2025 Eselon III Kecamatan Jatisampurna

**Tabel 2.8 Lampiran Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan
Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi**

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 161.340.000	PAD dan DAU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 14.727.381.400	PAD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.703.742.814	PAD dan DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 1.129.214.000	PAD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.000.000	PAD

Sumber data: Lampiran Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jatisampurna



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi pada setiap sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi selama tahun 2025 dalam mencapai tujuan Kecamatan Jatisampurna yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub ini, dilakukan analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatisampurna untuk tahun anggaran 2025. Karena Tahun 2025 merupakan masa transisi. Maka analisis ini



melibatkan dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan perencanaan transisi/menengah, dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan perencanaan periode kepemimpinan baru, serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi selama Tahun 2025.

A. Analisis Capaian Berdasarkan Renstra 2024-2026

Secara umum, terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya pada Tahun 2025. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Jatisampurna
Kota Bekasi Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.7	75.95	100.33%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	85.3	89.81	101.66%
3.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	54%	84%	155%

Sumber: Data Olahan SubBagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025



Pengukuran kinerja terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 telah dicapai berdasarkan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 menunjukkan trend yang meningkat, dimana capaian setiap Indikator Kinerja Utama telah tercapai.

1) Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna (Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna, sebagai salah satu Perangkat Daerah, menjalankan sistem akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.7	75.95	100.33%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025



Berdasarkan Tabel 3.2, target nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 75,7, sementara realisasi yang dicapai adalah 75,95. Dengan demikian, pencapaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran nilai AKIP mencapai 100,33 persen, yang berarti target telah terlampaui.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tren pencapaian nilai AKIP, berikut disajikan perbandingan capaian nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna antara Tahun 2020 dan 2025 pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3 Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, 2024 dan 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target			Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	75.5	75,7	76	100.1%	100.33%	101%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan di setiap Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Jatisampurna.

Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta diturunkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi.



2) Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna (Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat)

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu metode untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei dan opini masyarakat terhadap layanan yang diterima. Melalui survei ini, diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi dan pengembangan sistem layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Adapun capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.30	86.72	101.66%

Sumber: Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas, capaian indikator kinerja yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 mempunyai dengan target 85.30 dengan realisasi sebesar 86,72 maka capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar 101.66 persen yang dapat diartikan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 telah melampaui target.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan e-kuesioner (tautan dan kode QR) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (Sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 9 (Sembilan) unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam kuesioner terdiri dari :

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan;
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian;
4. Kesesuain Biaya/Tarif;
5. Kesesuain Peraturan (Hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan);
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan sarana dan masukan;



9. Kecukupan/keefektifan sarana informasi/pengaduan.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM Baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 terhadap 8 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Jatisampurna. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Nilai IKM Tri Wulan I Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,552	3,552	3,103	3,897	3,276	3,207	3,069	3,448	3,966
IKM Per Unsur (NRR x25)	88,8	88,8	77,58	97,43	81,9	80,18	76,73	86,2	99,15
Kategori	A	A	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	86,3								

Sumber data : Laporan SKM Triwulan I, Tahun 2025 Kec. Jatisampurna

Tabel 3.6 Nilai IKM Tri Wulan II Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,643	3,714	3,357	3,857	3,500	3,286	3,357	3,286	4,00
IKM Per Unsur (NRR x25)	91,08	92,85	89,93	96,43	87,5	82,15	83,93	82,15	100
Kategori	A	A	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	88,89								

Sumber data : Laporan SKM Triwulan II, Tahun 2025 Kec. Jatisampurna

Tabel 3.7 Nilai IKM Tri Wulan Iii Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produktif	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan	IKM Jenis Layanan
1.	Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris	102	86.28	86.78	87.75	89.23	87.25	87.5	86.53	86.53	100	88.64
2.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	15	85	86.68	85	88.33	88.33	88.33	86.68	86.68	100	87.96
3	Surat Keterangan Dispensasi	8	84.38	84.38	87.5	87.5	84.38	81.25	78.13	78.13	100	84.00
4	Surat Keterangan Dispensasi Nikah	6	91.68	87.5	79.18	87.5	75	75	9.68	87.5	100	87.96
5	Surat Keterangan Nikah Non Muslim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Surat Keterangan Domisili Hji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Surat Keterangan izin rame-rame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Surat Keterangan Rekomendasi Pendirian Rumah Tinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rerata IKM Per Unsur		86.25	86.65	87.03	88.75	86.45	86.65	86.08	86.08	86.45	100	
IK Unit Layanan		90.2										
Mutu Unit Layanan		A										

Sumber data : Laporan SKM Triwulan III, Tahun 2025 Kec. Jatisampurna



Tabel 3.8 Nilai IKM Tri Wulan IV Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pada Kecamatan Jatisampurna

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produktif	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan	IKM Jenis Layanan
1.	Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris	3	75	75	75	75	75	75	75	75	83.33	75.93
2.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	6	87.5	87.5	79.18	91.68	75	83.33	79.18	75	100	84.26
3	Surat Keterangan Dispensasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Surat Keterangan Dispensasi Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Surat Keterangan Nikah Non Muslim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Surat Keterangan Domisili Hji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Surat Keterangan izin rame-rame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Surat Keterangan Rekomendasi Pendirian Rumah Tinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rerata IKM Per Unsur			83.33	83.33	77.78	86.1	75	80.55	77.78	75	94.45	
IK Unit Layanan		81.48										
Mutu Unit Layanan		B (BAIK)										

Sumber data : Laporan SKM Triwulan IV, Tahun 2025 Kec. Jatisampurna



Berdasarkan hasil pengolahan data nilai IKM Tahun 2025, Triwulan I memperoleh nilai IKM sebesar 86,3, Triwulan II memperoleh nilai IKM sebesar 88,89, Triwulan III memperoleh nilai 90.2, dan di Triwulan IV memperoleh nilai IKM sebesar 81.48. Hasil survey pada triwulan IV mengalami penurunan, dikarenakan masa pengambilan survey yang singkat, yakni di bulan Oktober 2025 saja. Sehingga pelayanan di bulan November dan Desember tidak masuk hitungan. Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Nilai IKM}}{4} \\ &= \frac{86,3 + 88,89 + 90.2 + 81.48}{4} \\ &= 86,72 \text{ (Nilai IKM Tahun 2025)} \end{aligned}$$

Capaian IKM Tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Realisasi Nilai IKM}}{\text{Target IKM}} \times 100 \% \\ &\frac{86,72}{85.30} \times 100 \% = 101.66\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, maka realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 86.72. Nilai ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 85.30, dengan capaian sebesar 101.66%. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus- menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM



No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025	2023	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	84,68	85.30	85.42	86.72	100%	101.66%
Peningkatan Realisasi dan Capaian						1.33		1,66%

Sumber: Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan realisasi sebesar 1.33-point dari tahun sebelumnya. Persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik juga mengalami peningkatan sebesar 1%. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik yaitu kemudahan Prosedur Pelayanan, dan perilaku pelaksana yang masih harus ditingkatkan agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

3) Sasaran strategis 3: Mewujudkan Kecamatan Jatisampurna yang Aman dan Nyaman (Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Kecamatan Jatisampurna)

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan seiring dengan itu maka Kota Bekasi memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu



pembangunan.

Kecamatan Jatisampurna sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Jatisampurna dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode Renstra. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 15 zona dari 22 zona yang telah ditentukan tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Zona tertib K3 di Kecamatan Jatisampurna ditetapkan melalui Keputusan Camat Jatisampurna Kota Bekasi Nomor 660.2/04-Kc.BS.Set/2025 Tanggal : 03 Januari 2025 Pelaksanaan dan Pembagian Zona K3 di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Sedangkan Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terdapat 22 Zona yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Zona tertib K3 Kecamatan Jatisampurna periode Renstra 2025-2029. Pada tahun 2025 dilakukan penilaian terhadap titik tersebut dengan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.10 Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3

ZONA K3	Ketertiban			Kebersihan				Keindahan
	Tertib Jalan dan Fasos	Tertib Lingkungan	Tertib Penghuni Bangunan	Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan	Bersih Udara	Bersih Air	Bersih Sampah	
Kantor Kel. Jatiraden	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatisampurna	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatiranggon	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatirangga	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatikarya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Lingkungan Perumahan Citra Gran CBD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SMUN 7 Bekasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Kranggan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Cibubur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Jatisampurna

Dengan demikian pada tahun 2025 terdapat 11 zona dari 22 zona yang telah tertib K3. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna



dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	54	84	155%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 54 Persen, sementara realisasi mencapai 84 Persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sebesar 155 persen, maka capaian Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2025 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2025 sebanyak 11 zona di Kecamatan Jatisampurna telah tertib K3. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna antara tahun 2025 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna.



No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	84	84	100	100

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025

Untuk indikator Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 84 persen, capaian kinerja ini tercapai dengan target yang ditelah ditetapkan sebesar 54 persen dan capaian kinerja ini menyamai pencapaian dari tahun sebelumnya sehingga Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna terlampaui dan stabil.

Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Kecamatan Jatisampurna.

B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, fokus utama Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2025 adalah penguatan kemitraan dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Kecamatan. Secara umum, capaian kinerja terhadap target Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Berikut adalah ringkasan perbandingannya:



**Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Jatisampurna Tahun 2025**

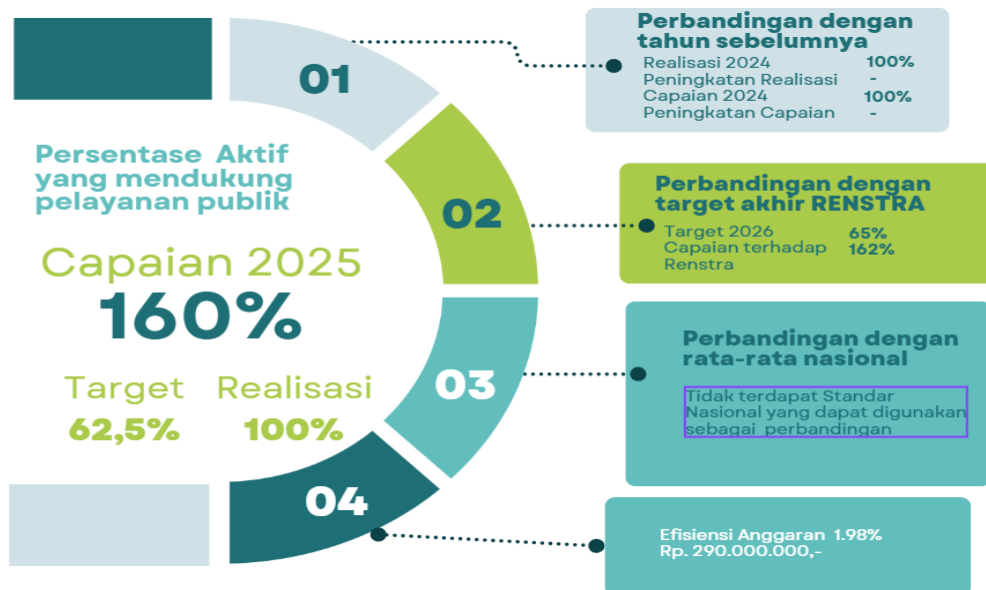
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
				2025	2025	2025
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Presentase	62.5%	100%	160%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Presentase	0.06%	1.52%	257,63%

Sumber Data : Analisis Kecamatan Jatisampurna, Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 telah dicapai berdasarkan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029 menunjukkan trend yang meningkat, dimana capaian setiap Indikator Kinerja Utama telah tercapai. Berikut adalah rincian analisis capaiannya:



1. Presentase LKM ktif Yang Mendukung Pelayanan Publik



Dalam rangka mengakselerasi program prioritas Pemerintah Pusat dan Wali Kota Bekasi khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta percepatan penurunan angka stunting. Kecamatan Jatisampurna mengoptimalkan tugas dan fungsi pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan. Langkah strategis ini ditempuh guna memperkuat sinergi partisipatif dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat basis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menegaskan bahwa LPM/LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, memberi mandat bagi Lembaga



kemasyarakatan (termasuk LPM) untuk terlibat aktif dalam pengusulan dan pengawasan kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini

Capaian realisasi kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di tahun 2025 diperoleh dari kontribusi unsur LKM yang ada di wilayah Kecamatan Jatisampurna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Kontribusi Unsur LKM Tahun 2025

No	Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM yang Aktif	Kontribusi
1.	PKK	60	60	<ul style="list-style-type: none"> - Kader PKK mendorong kemandirian pangan melalui memanfaatkan pekarangan untuk tanaman sayuran dan sumber protein, melakukan pelatihan pengelolaan makanan bergizi berbasis bahan baku lokal; - Kader PKK menyuplai data kondisi warga yang memenuhi kriteria rumah (sehat/kurang sehat), sumber air, jumlah jamban dsb.
2.	Posyandu	96	96	Kader Posyandu menyuplai data by name by address mengenai balita stunting dan ibu hamil KEK (Kekurangan energi Kronis). Data ini diintegrasikan baik melalui WhatsApp Group dengan Puskesmas yang



				diintegrasikan ke Web Aksi Bangda Kemendagri; - Melaksanakan kegiatan posyandu setiap bulan (penimbangan bayi dan balita, pemeriksaan lansia, imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil)
3	LPM	5	5	Mensinkronkan data usulan pembangunan (Musrenbang) dengan kondisi lingkungan di wilayah kumuh/lokasi fokus stunting, sehingga perbaikan drainase atau sanitasi tepat lokasi.
4	BKM	5	5	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan, serta menyediakan data basis ekonomi warga prasejahtera yang layak menerima dana bergulir.
5	RW	68	68	- Laporan Aminduk perTriwulan - Pengelolaan sampah
6	RT	348	348	Melakukan verifikasi faktual door to door terhadap kondisi sosial ekonomi warga
Total Unsur LKM		582	582	

Sumber data : Hasil Laporan Unsur LKM Kecamatan Jatisampurna, tahun 2025



Berdasarkan hasil laporan dari beberapa unsur LKM sampai dengan akhir Desember 2025, maka capaian realisasi persentase LKM yang aktif mendukung pelayanan publik dapat ditung sebagai berikut:

$$\text{Presentase LKM aktif} = \frac{\text{Jumlah LKM aktif yang mendukung pelayanan publik}}{\text{Jumlah LKM yang ada}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase LKM aktif} = \frac{582}{582} \times 100\%$$

$$\text{Presentase LKM aktif} = 100\%$$

Dari hasil perhitungan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu 62.5 persen. Rasio capaian target telah melampaui angka yang telah ditetapkan. Maka analisa capaian indikator kinerja persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Presentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	62.5%	100%	160%

Sumber data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

Indikator Persentase Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) aktif yang mendukung Pelayanan Publik pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 62.5%. Perlu ditekankan bahwa meskipun indikator ini merupakan hasil perumusan baru dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, namun secara faktual, berbagai unsur Lembaga Keswadayaan Masyarakat di



Kecamatan Jatisampurna telah menunjukkan keaktifan dalam sinergi yang berkelanjutan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penetapan indikator ini dalam dokumen perencanaan terbaru berfungsi sebagai formalisasi atas praktik (best practice) yang telah berjalan. Mengingat rekam jejak aktifitas pendampingan pelayanan publik telah terdokumentasi dengan baik sejak awal tahun, maka realisasi kinerja pada akhir tahun 2025 memiliki basis data yang valid dan akuntabel untuk dihitung secara menyeluruh.

Keaktifan 100% unsur LKM yang terdiri dari RT/RW, LPM, BKM, PKK dan Posyandu memberikan kontribusi fundamental terhadap akurasi data kewilayahan. Sinergi ini memastikan program prioritas Wali Kota Bekasi dan Pemerintah Pusat dapat dieksekusi dengan baik:

- **Penurunan Stunting:** data by name by address dari posyandu memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada balita beresiko, kader PKK berperan sebagai fasilitator di tingkat keluarga yang mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga;
- **Pentasan Kemiskinan:** validasi faktual dari RT/RW dan BKM meminimalisir kesalahan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Kemudian pengelolaan sampah di tingkat RW melibatkan warga lokal (sering kali kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai petugas kebersihan atau pengelola Bank Sampah yang dibayar melalui iuran swadaya yang di kelola secara lebih professional berkat dukungan infrastruktur dana hibah.
- **Pertumbuhan Ekonomi:** LPM memfasilitasi pendataan UMKN lokal untuk mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi wilayah.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk melihat konsistensi dan perkembangan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kecamatan Jatisampurna, dilakukan analisis perbandingan antara capaian tahun 2025 dengan periode Renstra sebelumnya (2018-2023).



**Tabel 3.16 Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja Sasaran
Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase				-	-				-	-
2	Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	-	-	-	-	62.5%	-	-	-	-	100%

Sumber data : LKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2021,2022, dan 2023

Pada periode 2021-2023, keterlibatan LKM (LPM, RT/RW, PKK, Posyandu) difokuskan pada pemulihan pascapandemi dan penguatan infrastruktur kewilayahan. Meskipun realisasi pada tahun-tahun tersebut menunjukkan tren positif, pengukuran kinerja masih bersifat umum dan belum secara spesifik menetapkan variabel “dukungan terhadap pelayanan publik” sebagai indikator kinerja utama.

Pada tahun 2024, terdapat kekosongan pelaporan untuk indikator ini. Hal ini disebabkan oleh penerapan mengisi masa transisi kepemimpinan daerah. Dalam dokumen tersebut, indikator spesifik mengenai persentase LKM aktif tidak dicantumkan dalam matriks kinerja Kecamatan, sehingga secara administratif tidak dilakukan pengukuran formal. Namun, secara faktual, aktivitas LKM di lapangan tetap berjalan sebagai bentuk keberlanjutan fungsi kemasyarakatan.encana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yang disusun untuk mengisi masa transisi kepemimpinan daerah. Dalam dokumen tersebut, indikator spesifik mengenai persentase LKM aktif tidak dicantumkan dalam matriks kinerja Kecamatan, sehingga secara administratif tidak dilakukan pengukuran formal. Namun, secara faktual, aktivitas LKM di lapangan tetap berjalan sebagai bentuk keberlanjutan fungsi kemasyarakatan.



Memasuki tahun 2025, indikator ini dimunculkan kembali dengan rumusan yang lebih tajam dalam Renstra 2025-2029. Realisasi yang mencapai 100% (melampaui target 62.5%) menunjukkan adanya lonjakan efektivitas pembinaan.

c) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memahami tren keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam menggerakkan potensi masyarakat, dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Analisis ini memberikan gambaran bagaimana efektivitas pembinaan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) mengalami transformasi yang signifikan.

Tabel 3.17 Perbandingan Akumulasi Capaian Kinerja Sasaran Presentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik dengan Capaian Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase	100%	100%	100%	-	-
2	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	-	-	-	-	160%

Sumber data: LKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2021,2022 dan 2023

Pada rentang tahun 2021 hingga 2023, kinerja kecamatan dinilai melalui indikator "Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat". Selama tiga tahun berturut-turut, Kecamatan Jatisampurna berhasil menjaga stabilitas kinerjanya dengan capaian konstan di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan dasar dan pemulihan pascapandemi di wilayah Jatisampurna telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Pada tahun 2024, terdapat kekosongan data capaian untuk indikator ini. Hal tersebut merupakan implikasi dari masa transisi perencanaan daerah (RPD 2024-2026), di mana terjadi penyesuaian administratif yang menyebabkan indikator mengenai LKM tidak dimunculkan dalam matriks kinerja tahunan. Namun demikian, secara operasional di lapangan, pembinaan terhadap RT, RW, dan elemen LKM lainnya tetap berjalan guna menjaga stabilitas pelayanan di lingkungan masyarakat.

Tahun 2025 menjadi titik balik penting dengan diberlakukannya Renstra 2025-2029. Indikator kinerja dipertajam menjadi "Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik". Hasilnya sangat positif:

- Target : 62.5%
- Realisasi : 100%
- Capaian Kinerja : 160%

Capaian sebesar 160% ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jatisampurna tidak hanya berhasil melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga berhasil mengaktivasi seluruh potensi LKM (100% aktif) untuk terlibat langsung dalam pelayanan publik. Lonjakan ini membuktikan bahwa strategi pembinaan yang baru jauh lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan ini menunjukkan adanya tren positif di mana Kecamatan Jatisampurna berhasil mengubah pola pemberdayaan masyarakat yang bersifat umum (pada 2021-2023) menjadi dukungan pelayanan publik yang lebih nyata dan terukur di tahun 2025.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Tidak hanya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kecamatan Jatisampurna juga melihat sejauh mana pencapaian



tahun 2025 ini berkontribusi terhadap target akhir "garis finish" di tahun 2029.

Berdasarkan **Tabel 3.18 hasil yang dicapai menunjukkan performa yang luar biasa untuk tahun pertama periode Renstra baru:**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Presentase LKM	
		2025	2029
Target	Persen	62.5%	70.5%
Realisasi	Persen	100%	
Capaian terhadap Renstra	Persen	142%	

Sumber Data : Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

Target Akhir Jangka Panjang (Tahun 2029): Pemerintah Kecamatan sebenarnya mematok target bertahap hingga angka 70.5% di akhir tahun 2029 untuk persentase LKM aktif. Realisasi Tahun Pertama (Tahun 2025): Di luar dugaan, pada tahun 2025 ini realisasi keterlibatan LKM sudah menyentuh angka 100%. Capaian terhadap Target Renstra: Jika dihitung terhadap target akhir tahun 2029, maka kinerja Kecamatan Jatisampurna saat ini sudah mencapai 142%.

Angka 142% menunjukkan bahwa Kecamatan Jatisampurna telah berhasil melampaui target lima tahunan hanya dalam waktu satu tahun. Pencapaian ini membuktikan bahwa antusiasme dan keaktifan LKM di wilayah Jatisampurna dalam mendukung pelayanan publik jauh lebih tinggi dari ekspektasi awal.

Dengan hasil yang sudah mencapai 100% di tahun pertama, tantangan bagi Kecamatan Jatisampurna ke depan adalah bukan lagi sekadar "meningkatkan jumlah", melainkan "menjaga konsistensi" dan kualitas keaktifan LKM tersebut agar tetap maksimal hingga akhir periode di tahun 2029 nanti.

e) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional



Mengingat indikator "Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik" merupakan indikator spesifik kewilayahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna, maka evaluasi capaiannya dilakukan melalui analisis relevansi terhadap sasaran strategis nasional dalam RPJMN 2025-2029. Meskipun tidak terdapat pembandingan angka (kuantitatif) yang serupa secara langsung di level nasional, realisasi 100% LKM Aktif di Kecamatan Jatisampurna merupakan kontribusi fundamental terhadap dua pilar utama RPJMN:

1. Pendukung Transformasi Tata Kelola (Sasaran Nasional ke-13)
Keaktifan 100% LKM (RT/RW, LPM, BKM, PKK, dan Posyandu) di Kecamatan Jatisampurna merupakan wujud dari strategi nasional dalam memperkuat Partisipasi Masyarakat sebagai pilar tata kelola. Realisasi ini membuktikan bahwa Kecamatan Jatisampurna telah berhasil menggerakkan modal sosial untuk mendukung pelayanan publik.
2. Penguatan Akurasi Data Nasional (Satu Data Indonesia)
Realisasi 100% LKM yang aktif menyuplai data by name by address di Jatisampurna adalah solusi nyata terhadap mandat RPJMN mengenai Akurasi Data Penanggulangan Kemiskinan. Melalui dukungan kader LKM, Kecamatan telah menjalankan fungsi verifikasi lapangan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran (presisi), selaras dengan semangat Satu Data Indonesia.
3. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Secara Nasional
Sinergi antara keaktifan LKM dan peningkatan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa Kecamatan Jatisampurna telah melampaui standar minimal pelayanan publik yang diamanatkan dalam RPJMN. Realisasi ini menjadi bukti bahwa instrumen kemasyarakatan adalah katalisator utama dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan prima yang dicanangkan pemerintah pusat.



f) Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan serta peningkatan kinerja indikator Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Jatisampurna dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM

Aktivasi LKM (seperti RT, RW, PKK, BKM dan LPM) sangat bergantung pada pemahaman pengurus terhadap tugas pokok dan fungsinya, sehingga Kecamatan Jatisampurna konsisten untuk meningkatkan kompetensi manajerial pengurus LKM melalui pembinaan rutin. Selain itu dengan adanya implementasi system pelaporan berbasis aplikasi (seperti SIMPOKASI) memudahkan kader posyandu melaporkan kegiatan secara real-time.

2. Kepemimpinan yang kolaboratif

Camat dan Lurah berperan aktif sebagai fasilitator yang mampu merangkul tokoh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti pertemuan yang melibatkan RT/RW dan tokoh Masyarakat serta forkopincam dari bulan Januari s/d November, serta pertemuan terbaru di Desember 2025 yaitu Camat Gebug Kampung (Gerebeg dan Rembug). Kedua pertemuan tersebut sama-sama bertujuan untuk berdialog langsung dengan warga masyarakat dan unsur LKM khususnya untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Jatisampurna .Pertemuan ini penting karena hubungan yang harmonis antara birokrasi dan Lembaga kemasyarakatan menghilangkan hambatan komunikasi, sehingga program kerja pemerintah cepat terserap ke level akar rumput.

3. Sistem Insentif

Adanya pemberian insentif yang tepat waktu bagi unsur LKM memotivasi mereka untuk meningkatkan keaktifannya



4. Pemberdayaan UMKN

Melalui PKK dan LPM, muncul klaster-klaster UMKN di tingkat Kelurahan. Melalui PKK dan Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan memfasilitasi serta mempermudah izin usaha (NIB), sertifikat halal, sosialisasi dalam mengemas produk agar lebih menarik serta fasilitasi pameran produk local di tingkat Kecamatan Jatisampurna.

Mengingat realisasi kinerja sudah tinggi, maka di tahun 2026 Kecamatan Jatisampurna perlu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Audit sosial berbasis warga, yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat non-LKM untuk mengevaluasi hasil fisik dari dana hibah 100 juta. Misalnya apakah lampu jalan yang di pasang berkualitas baik? Apakah taman yang dibangun terawat?
2. Laporan Kinerja Publik, yaitu dengan mempublikasikan realisasi anggaran dan capaian fisik di media sosial kecamatan atau papan pengumuman kelurahan agar warga memiliki (sense of ownership) terhadap pembangunan tersebut;
3. Memastikan dana Bekasi Keren tidak berhenti di pembangunan fisik saja, tapi menghasilkan putaran ekonomi.

g) Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan pencapaian target kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	
				Rp	(%)		
Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.778.687.040	14.627.381.400	14.380.996.775	98,10	100%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.578.687.040	14.477.381.400	14.130.996.755	96,40	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	120.000.000	110.936.000	92,45	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Jatisampurna)	116.000.000	116.000.000	82.212.555	70,87	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisampurna)	1.635.771.200	3.600.022.200	3.526.551.600	97,96	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiraden)	1.029.516.800	2.182.643.800	2.171.242.600	99,48	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirangga)	1.767.910.400	2.634.306.400	2.553.706.800	99,64	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiranggon)	1.433.813.000	2.152.659.000	2.135.454.400	99,20	100%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikarya)	1.056.176.000	2.521.750.000	2.450.892.800	97,19	100%	
	Pembangunan Sarana Prasana Kelurahan Jatisampurna	750.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%	
	Pembangunan Sarana Prasana Kelurahan Jatiraden	752.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%	
	Pembangunan Sarana Prasana Kelurahan Jatirangga	752.500.000	200.000.000	200.000.000	100	100%	
	Pembangunan Sarana Prasana Kelurahan Jatiranggon	515.000.000	300.000.000	300.000.000	100	100%	
	Pembangunan Sarana Prasana Kelurahan Jatikarya	650.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%	
	Evaluasi Kelurahan		50.000.000	50.000.000	0		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		200.000.000	250.000.000	250.000.000	99,8	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatisampurna		40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%



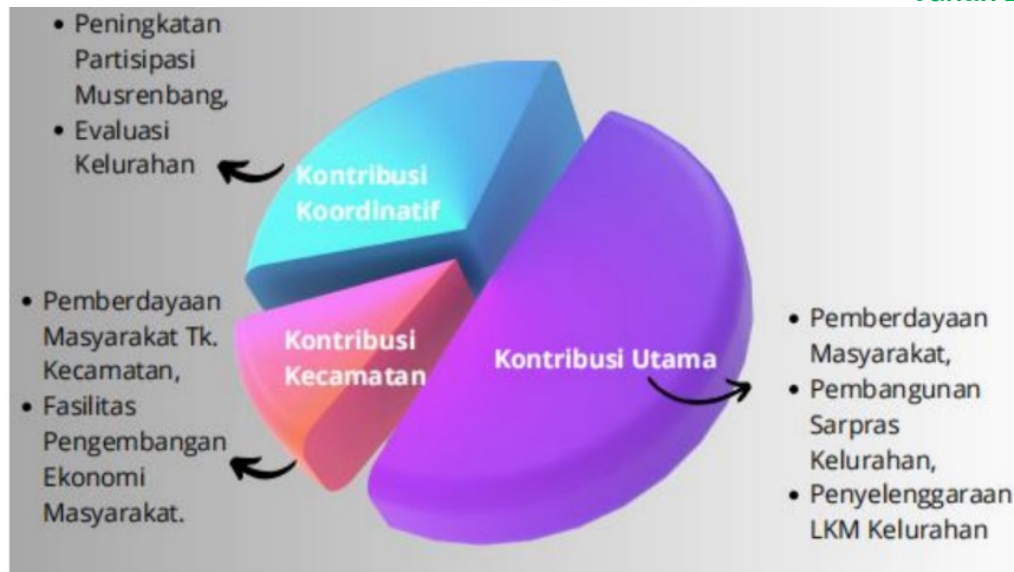
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiraden	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirangga	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiranggon	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatikarya	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	50.000.000	49.140.000	98,94	100%

Sumber data: Siencang e-monev Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025,

Berdasarkan tabel di atas, pagu anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan dari **Rp 10.778.687.040 (pagu murni) menjadi Rp 14.627.381.400** (pagu setelah perubahan), atau meningkat sebesar **35,70%**. Kenaikan pagu ini mencerminkan adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan (LKM) dalam menunjang pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatisampurna. Dukungan anggaran yang lebih besar tersebut berbanding lurus dengan upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, pelaksanaan program pemberdayaan berpotensi tidak optimal dan partisipasi masyarakat cenderung menurun. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya Kecamatan Jatisampurna tetap menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, yang ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar **1,98%** atau senilai **Rp 290.000.000**.

Chart 3.

Kontribusi Kuantitatif Masing-Masing Kegiatan terhadap Capaian Indikator



Kontribusi utama ada pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Kegiatan ini merupakan tulang punggung pencapaian indikator dengan kontribusi realisasi sebesar Rp14.627.381.400. Keaktifan LKM di lapangan sangat bergantung pada serapan anggaran di tingkat sub-kegiatan berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat di 5 kelurahan : Sub-kegiatan ini memberikan kontribusi finansial terbesar untuk memastikan LKM tetap aktif bergerak.
 - a) Kelurahan Jatisampurna menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp. 3.766.551.600
 - b) Kelurahan Jatikarya berkontribusi sebesar Rp. 2.650.892.800,-
 - c) Kelurahan Jatirangga berkontribusi sebesar Rp. 2.753.706.800
 - d) Kelurahan Jatiranggon berkontribusi sebesar 2.435.454.400,-
 - e) Kelurahan Jatiraden berkontribusi sebesar Rp. 2.371.242.600,-
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan : Masing-masing kelurahan (Jatisampurna, Jatiraden, Jatirangga, Jatiranggon, Jatikarya) merealisasikan anggaran secara presisi sebesar Rp. 200.000.000 (Total Rp. 1.000.000.000). Secara Kuantitatif serapan 100% disektor ini memastikan ketersediaan fasilitas fisik yang mendukung operasional LKM dalam pelayanan publik.



3. Penyelenggaraan LKM Kelurahan: Dukungan langsung terhadap kelembagaan diberikan melalui alokasi rutin sebesar Rp40.000.000 per kelurahan dengan realisasi tepat 100%. Ini menjadi jaminan kuantitatif bahwa secara administratif dan operasional, lembaga kemasyarakatan memiliki dasar pendanaan untuk beraktivitas.
4. Peningkatan Partisipasi Musrenbang: Realisasi sebesar Rp 110.936.000 (92,45%) menunjukkan bahwa LKM aktif dalam proses perencanaan pembangunan, yang merupakan salah satu dimensi utama dari "LKM Aktif".
5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : Dengan realisasi Rp. 49.140.000,-

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan memberikan kontribusi sebesar Rp249.140.000 (98,58%). Di dalamnya terdapat sub-kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan realisasi Rp49.140.000, yang secara kuantitatif mendukung peran LKM dalam pemberdayaan ekonomi warga di wilayah Kecamatan Jatisampurna

Keberhasilan capaian 100% LKM aktif di Kecamatan Jatisampurna merupakan hasil dari dukungan peningkatan pagu anggaran yang signifikan serta tingginya tingkat penyerapan anggaran yang mencapai sekitar 98,10%. Peningkatan anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan secara optimal di tingkat kelurahan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terfasilitasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pengelolaan dana hibah RW turut memperkuat pelaksanaan program di lapangan. Sinergi antara dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat tersebut memungkinkan pembangunan sarana dan prasarana serta operasional LKM dapat direalisasikan secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap tercapainya indikator kinerja LKM aktif sebesar 100%.



h) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian tersebut di atas juga tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumber daya, berikut analisisnya:

Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase LKM yang mendukung pelayanan Publik

Jenis Sumber Daya	Input(Biaya/Usaha)	Output	Rasio Efisiensi
SDM	Insentif Kader LKM	Cakupan pelayanan 100% wilayah	Sangat tinggi (Biaya rendah, jangkauan luas)
Waktu	Koordinasi digital/WhatsApp	Renspon cepat terhadap masalah warga	Tinggi (memangkas birokrasi manual)
Anggaran	PAD dan Dana Khusus	Penurunan stunting dan kemiskinan	Optimal (output melampaui input finansial)
Fasilitas	Kantor Kelurahan/Kantor RW	Pusat kegiatan ekonomi dan sosial	Maksimal (multi fungsi sarana publik)

Sumber data : Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatisampurna tidak menambah jumlah pegawai birokrasi, melainkan mengoptimalkan modal social melalui LKM. Dengan mengaktifkan 100% LKM (RT, RW, PKK, LPM, BKM), pemerintah mendapatkan “tenaga kerja” tambahan tanpa bebang gaji ASN. Insentif yang diberikan kepada pengurus LKM jauh lebih efisien dibandingkan biaya operasional jika pekerja lapangan dilakukan oleh pihak ketiga atau tim survei professional. Kader PKK atau Posyandu tidak hanya focus pada Kesehatan (stunting), tetapi juga dilibatkan dalam pendataan kemiskinan dan UMKN. Ini Adalah efisiensi peran, dimana satu orang bisa menjalankan beberapa fungsi intervensi sekaligus.

2. Efisiensi anggaran

Pencapaian ini menggunakan prinsip Konvergensi Anggaran, yaitu penggabungan berbagai sumber dana untuk satu tujuan yang sama, dimana Dana Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional LKM secara tepat sasaran, sehingga tidak

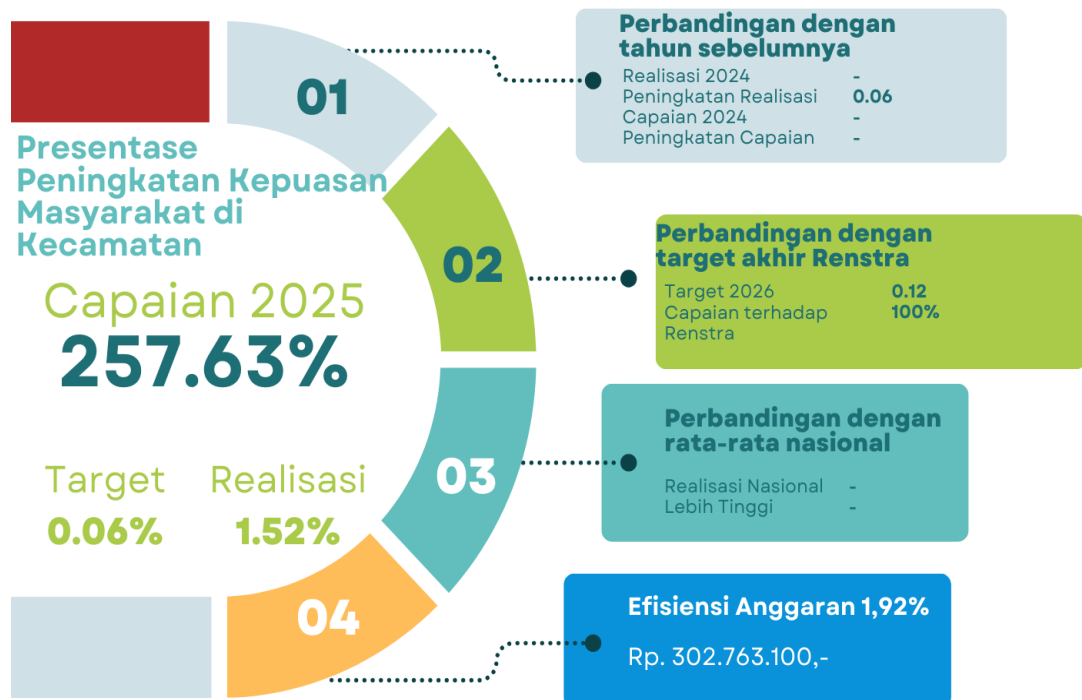


terjadi tumpang tindik dari Dinas terkait (seperti Dinas Kesehatan untuk stunting)

3. Efisiensi Operasional melalui Digitalisasi

Penggunaan teknologi informasi secara signifikan memangkas biaya dan waktu administrasi, misalnya pelaporan keaktifan LKM melalui aplikasi atau group kordinasi digital mengurangi biaya cetak, kertas dan biaya perjalanan dinas untuk sekadar mengantarkan laporan fisik ke Kecamatan. Selain itu dengan data yang akurat dari LKM yang aktif, bantuan sosial dan intervensi stunting tidak “salah alamat”. Efisiensi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan



a) Perbandingan Antara Realissi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian nilai Indeks



Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada periode Renstra 2025-2029, indikator dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis. Dengan menargetkan "peningkatan", aparatur Kecamatan Jatisampurna dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan standar yang ada, melainkan terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas layanan dari waktu ke waktu. Hasil perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.21 Perhitungan Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Presentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatisamura	85,42	86,72	1,52%

Sumber data : Nilai IKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 dan 2025

Dari tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai IKM dari 85,42 menjadi 86,70. Secara matematis, hal ini menghasilkan realisasi peningkatan sebesar 1,52%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan historis yang diproyeksikan. Dengan realisasi sebesar 1.52% maka persentase capaian terhadap target dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Presentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,06%	1,52%	257,63%

Sumber data : Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025;



Penetapan target sebesar 0,06% untuk indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 tidak ditentukan secara acak. Target tersebut merupakan hasil perhitungan teknis yang didasarkan pada rata-rata kenaikan nilai IKM Kecamatan Jatisampurna dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tren historis, peningkatan nilai kepuasan masyarakat cenderung bergerak secara linier dan bertahap. Oleh karena itu, target 0,06% merepresentasikan proyeksi pertumbuhan yang bersifat normal atau moderat, dengan asumsi pelayanan dilaksanakan secara rutin dan tanpa intervensi strategis tambahan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi peningkatan yang mencapai 1,52% menunjukkan bahwa strategi dan inovasi pelayanan yang diterapkan pada tahun 2025 mampu melampaui pola pertumbuhan linier tersebut. Capaian ini mengindikasikan adanya akselerasi peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak langsung pada tingkat kepuasan masyarakat.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	82	84		82,5	85,42	86,72
2	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	0,06%	-	-	1,52%

Sumber data : Nilai IKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan data pada Tabel 3.32, terlihat adanya tren positif dalam hal pelayanan kepada warga di Kecamatan Jatisampurna . Meskipun cara pengukuran (indikator) mengalami penyesuaian pada tahun 2025, namun sumber datanya tetap konsisten menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pada tahun 2023 dan 2024, performa pelayanan diukur menggunakan angka indeks. Dalam dua tahun tersebut, Kecamatan Jatisampurna selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan:

- Di tahun 2023, dari target 82, kita berhasil meraih nilai 82,5 (Capaian 100 %).
- Di tahun 2024, nilai tersebut merangkak naik menjadi 85,42 (Capaian 101%). Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan di Jatisampurna sudah berada di level yang sangat baik secara konsisten.

Memasuki tahun 2025, fokus kinerja dialihkan dari sekadar "angka indeks" menjadi "persentase peningkatan". Hal ini dilakukan untuk memacu semangat aparatur agar tidak cepat puas dan terus melakukan inovasi. Hasilnya sangat luar biasa:

- Target Peningkatan : 0,06%
- Realisasi Kenaikan : 1,52%

Angka realisasi sebesar 1,52% ini merupakan ”lompatan besar, upaya percepatan (akselerasi) pelayanan yang dilakukan di tahun 2025 memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat

c) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Capaian Kinerja Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian (%)		
			2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai		101%	



2	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	257,63%
---	---	--------	---	---	---------

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator kinerja Sasaran Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dengan Tahun Lalu

Sumber data : Nilai IKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2023,2024 dan 2025

Angka capaian sebesar 257,63% menunjukkan bahwa upaya akselerasi dan inovasi pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2025 memberikan hasil yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Jika sebelumnya target peningkatan hanya sebesar 0,06%, realisasi yang dicapai sebesar 1,52% menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat lebih dari dua kali lipat dibandingkan proyeksi awal.

Perbandingan tersebut membuktikan bahwa Kecamatan Jatisampurna tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pelayanan, tetapi juga berhasil melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik secara signifikan pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen seluruh aparatur kecamatan dalam menjaga kualitas layanan, bahkan di tengah dinamika dan masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini sekaligus menjadi indikator bahwa orientasi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029



Dengan capaian nilai IKM sebesar 86,72 pada awal periode Renstra, Kecamatan Jatisampurna berada pada posisi yang relatif progresif dalam pencapaian target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah melampaui proyeksi pertumbuhan normal pada tahun pertama pelaksanaan Renstra. Apabila tren peningkatan sebesar 1,52% per tahun dapat dipertahankan secara konsisten, maka target akhir Renstra Tahun 2029 berpotensi tercapai lebih cepat, yaitu sekitar tahun 2027–2028. Kondisi ini menempatkan Kecamatan Jatisampurna pada jalur percepatan (*fast track*) dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan kepuasan masyarakat. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Target Akhir 2025-2029

Capaian Indikator Sasaran	Satuan	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
		2025	2029
Target	Persen	0,06	0,29
Realisasi	Persen	1,52%	-
Capaian terhadap Renstra	Persen	524,14%	

Sumber data : Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

Berdasarkan perhitungan akumulasi, capaian kinerja tahun 2025 terhadap target keseluruhan Renstra 2025-2029 adalah sebesar 524,14%. Angka ini menunjukkan progres yang sangat sehat untuk sebuah langkah awal. Artinya, dalam satu tahun



pertama, kita sudah berhasil mengamankan lebih dari seperlima jalan menuju target akhir di tahun 2029.

e) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, tidak tercantum target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat., namun terdapat target indikator Indeks Pelayanan publik (IPP) baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Kota. Meskipun IKM dan IPP berbeda, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu komponen dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam evaluasi IPP yang dilakukan oleh Kemenpan-RB, salah satu unsur yang dinilai adalah “Kebijakan Pelayanan” dan “Konsultasi Pengaduan”, dimana hasil survei IKM sering kali dijadikan data dukung untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Target IPP tahun 2025 dalam RPJMN 2025-2029 adalah 3.68, dan Indeks Pelayanan Publik Kota adalah 3.96. Sepanjang tahun 2025, unsur pengaduan mendapat nilai paling tinggi, diikuti dengan biaya dan sarpras. Ini menunjukkan konsultasi pengaduan dan kebijakan terkait pengadaan sarpras dan kampanye gratis administrasi telah berhasil. Ini dapat menunjang nilai IPP tingkat Kota.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jatisampurna Presentase Peningkatan Kepuasa Masyarakat di Kecamatan dengan Standar Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)

No	Renstra Kecamatan Jatisampurna 2025-2029 (Perubahan Renja 2025)						RPJMN 2025-2029		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat	Presentase Peningkatan Kepuasan	Presentase	0,06	1,52%	257,63%		Indeks Pelayanan Publik	3.68



	di wilayah Kecamatan Jatisampurna	Masyarakatdi Kecamatan						Indeks Pelayanan Publik Kota	3.96
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	------

f) Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kelemahan Capaian Kinerja

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan untuk dapat mendukung capaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna Adalah sebagai berikut:

1. Responsivitas Kanal Pengaduan: Pembukaan kotak pengaduan melalui kontak website dan DM Instagram memungkinkan setiap keluhan direspon secara cepat. Kecepatan penanganan masalah ini menjadi variabel penentu yang mendongkrak nilai IKM tahun ini.
2. Waktu Pelayanan yang singkat yaitu dengan memberikan kemudahan pesyaratan kepada masyarakat mendorong pelayanan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, warga Kecamatan Jatisampurna memperoleh fasilitas jemput bola yang ada dalam SOP Pelayanan Kecamatan Jatisampurna melalui petugas PAMOR Kecamatan Jatisampurna . Hal ini dapat meningkatkan kesadaran bagi warga Kecamatan Jatisampurna untuk senantiasa memperbarui data perubahan jika terdapat penambahan dan pengurangan warga serta dapat berkonsultasi kepada petugas PAMOR Kecamatan Jatisampurna terkait masalah administrasi kependudukan.
3. Transparansi Digital melalui Website Resmi: Publikasi SOP 8 Pelayanan Utama pada website kecamatan memberikan kepastian hukum dan waktu bagi warga. Kejelasan alur ini meminimalisir kebingungan masyarakat saat mengurus administrasi.



4. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2025 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Jatisampurna .

g) Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, indikator ini menggunakan 4 Program dan 11 Kegiatan, yang terdiri dari 1 Program BLPU dan 3 Program BLU. Adapun rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja
				(Rp)	(%)	
Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	230.000.000	159.775.000	155.325.494	98,32	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	80.000.000	11.340.000	11.226.593	99	100%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	80.000.000	11.340.000	11.226.593	99	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	150.000.000	148.415.000	144.098.901	97,63	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Jatisampurna	50.000.000	48.415.000	45.902.616	94,81	100%



Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatisampurna	20.000.000	20.000.000	19.693.853	98,47	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatiraden	20.000.000	20.000.000	19.799.958	99	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatirangga	20.000.000	20.000.000	19.752.463	98,76	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatiranggon	20.000.000	20.000.000	19.941.805	99,71	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatikarya	20.000.000	20.000.000	19.008.206	95,04	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.222.000.000	1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.222.000.000	1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	101.000.000	64.814.000	48.140.000	74,27	100%



Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	335.000.000	278.400.000	270.895.794	98,01	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatisampurna)	192.000.000	192.000.000	186.000.000	96,88	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiraden)	156.000.000	156.000.000	156.000.000	100	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatirangga)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiranggon)	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatikarya)	108.000.000	108.000.000	108.000.000	100	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.064.241.480	21.703.742.814	19.617.092.567	90,39	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.521.771.000	16.750.806.000	14.991.823.863	89,50	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.521.771.000	16.747.806.000	14.988.823.863	89,50	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	53.900.000	0		
Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000	0	0		



Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	53.900.000	0		100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.000.000	487.991.900	397.141.748	81,38	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	16.983.555	84,92	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.864.672	273.864.672	267.159.470	97,55	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.135.328	52.677.228	51.844.233	98,42	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	18.084.000	90,42	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	66.450.000	38.630.500	58,13	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	4.440.000	88,80	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	22.576.000	20.912.400	92,63	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	22.576.000	20.912.400	92,63	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.164.470.480	3.718.768.914	3.628.876.948	97,58	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	199.802.222	99,90	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.954.470.480	3.518.768.914	3.429.074.726	97,45	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.000.000	666.700.000	575.337.608	86,30	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	95.000.000	83.850.350	88,26	100%

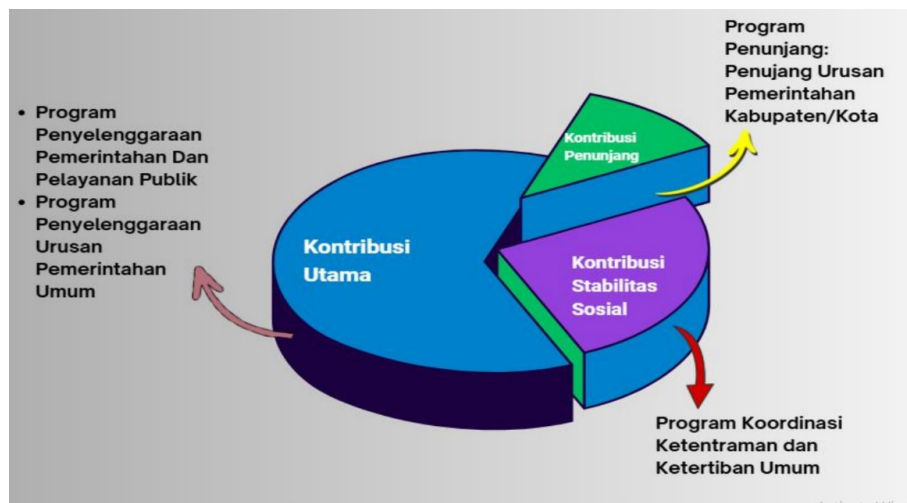


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000	250.000.000	172.967.038	69,19	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	43.000.000	42.221.040	98,19	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	278.700.000	276.299.180	99,14	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	50.000.000	18.425.000	36,85	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	18.425.000	36,85	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	18.425.000	36,85	100%

Sumber data : Siencang e-monev Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025, TW I dan TW IV

Terdapat korelasi kuat antara penyerapan pada sub-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga, dengan kenaikan persepsi kepuasan tersebut. Berikut analisis mendalam mengenai program/kegiatan penunjang keberhasilan tersebut:

Chart 4 Kontribusi Kuantitatif Masing-masing Program terhadap Capaian Indikator





1. Kontribusi Utama :

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Melalui kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana (saprass) di 5 (lima) kelurahan, realisasi anggaran mencapai kisaran 95%–99%, dengan alokasi sebesar Rp20.000.000 per kelurahan yang terserap secara optimal. Pelaksanaan pemeliharaan sarana umum yang dilakukan melalui sinergi antara kecamatan dan kelurahan memberikan dampak yang langsung terlihat (visible impact) bagi masyarakat. Lingkungan fisik yang terawat, bersih, dan tertata rapi menciptakan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, karena warga secara langsung merasakan manfaat dari keberadaan dan responsivitas pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan di wilayahnya.

b) Kemudian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, program ini berfokus pada penguatan kelembagaan melalui Forkpimcam (realisasi 36,85%). Kegiatan ini memastikan fungsi koordinasi di tingkat Kecamatan berjalan tanpa birokrasi.

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dilakukan melalui Rapat koordinasi rutin pimpinan (Camat, Danramil, Kapolsek), pembahasan isu-isu strategis (seperti tahapan Pemilu atau kebijakan nasional), serta penguatan hubungan antarlembaga secara formal sehingga menghasilkan Harmonisasi kebijakan, pengambilan keputusan strategis tingkat kecamatan dan laporan stabilitas wilayah kepada Wali Kota.

2. Kontribusi Stabilitas Sosial :

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Pelaksanaan kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum melalui harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 96%–100% di seluruh kelurahan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jatisampurna dalam melakukan pendekatan persuasif dan partisipatif dalam menjaga stabilitas sosial. Keterlibatan aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses koordinasi berperan penting dalam menurunkan potensi konflik sosial serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga. Ketika unsur masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan wilayah, persepsi terhadap kinerja pemerintah menjadi lebih positif. Selain itu, sinergitas antara unsur Forkopimcam (TNI dan POLRI) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan turut memperkuat rasa aman dan kondusivitas wilayah. Stabilitas sosial yang terjaga menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan.

3. Kontribusi Penunjang

Program Penunjang: Penujang Urusan Pemerintahan kabupaten/Kota, Program ini bersifat internal, namun memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan publik di lini depan (*front-end service*). Kegagalan dalam pengelolaan program penunjang akan berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar 89,50%, sedangkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai realisasi sebesar 97,45%. Pos anggaran ini membiayai kebutuhan operasional aparatur, termasuk tenaga pendukung seperti Satgas Pamor yang aktif



di tingkat RW. Keaktifan Satgas Pamor dalam mendukung pelaksanaan program Pesona dan kegiatan pelayanan lainnya di wilayah dibiayai melalui pos ini. Tingginya realisasi anggaran memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta keberlangsungan pelayanan di lapangan. Selain itu, kegiatan lain dalam program penunjang turut menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara efektif, responsif, dan berkesinambungan

c) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2025 tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan oleh efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia. Peningkatan kinerja terjadi karena adanya optimalisasi perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pengawasan internal yang konsisten sepanjang tahun berjalan. Pendekatan *working smarter* diterapkan melalui prioritas kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran aparatur di tingkat kelurahan dan RW. Dengan strategi tersebut, setiap rupiah anggaran diarahkan untuk menghasilkan output yang terukur dan outcome yang relevan dengan kebutuhan warga. Efisiensi yang tercapai tidak hanya terlihat dari tingginya tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari keberhasilan mengonversi belanja publik menjadi peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tahun 2025 merupakan hasil dari manajemen kinerja yang terencana dan terkontrol, bukan semata akibat peningkatan pagu anggaran.

Efisiensi yang diterapkan tidak dimaknai sebagai sekadar pengurangan biaya, melainkan sebagai upaya



optimalisasi seluruh aset organisasi agar menghasilkan nilai tambah yang terukur. Setiap sumber daya—baik personel, teknologi, maupun jejaring kelembagaan—dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis. Pendekatan ini menekankan prinsip *value for money*, yakni memastikan bahwa setiap pengeluaran menghasilkan manfaat yang sebanding atau lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, efisiensi menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar instrumen penghematan anggaran. Berikut merupakan tiga pilar utama efisiensi yang menjadi kunci keberhasilan Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2025:

1. Pemanfaatan platform digital yang telah akrab di masyarakat menjadi strategi efisiensi yang efektif tanpa memerlukan investasi infrastruktur baru yang besar. Optimalisasi aplikasi perpesanan seperti *WhatsApp* mempercepat koordinasi internal antaraparatur serta membuka kanal komunikasi langsung dengan masyarakat untuk penyampaian pengaduan secara informal. Kecepatan respons terhadap keluhan warga melalui media ini berkontribusi langsung pada peningkatan nilai unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Respons yang cepat dan solutif memperkuat persepsi masyarakat terhadap daya tanggap (*responsiveness*) pemerintah kecamatan. Sementara itu, pemanfaatan SP4N-LAPOR! memastikan setiap pengaduan terdokumentasi secara sistematis dan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas. Mekanisme ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan pengaduan. Secara alitis, kombinasi antara kanal informal (*WhatsApp*) dan kanal formal (SP4N-LAPOR!)



membentuk sistem pengelolaan pengaduan yang responsif sekaligus terukur. Sinergi ini meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kualitas pelayanan berbasis teknologi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKM tahun 2025.

2. Sinergitas Forkopimcam, Kolaborasi antara Camat, Kapolsek, dan Danramil dalam forum Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menjadi instrumen strategis dalam meminimalkan hambatan birokrasi lintas sektoral. Sinergi ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan wilayah tanpa harus melalui prosedur administratif yang berlapis. Koordinasi yang solid tersebut memastikan pelaksanaan program fisik, seperti penataan lingkungan RW dalam program Bekasi Keren, berjalan aman dan kondusif. Dukungan unsur TNI dan POLRI tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Permasalahan sosial yang kompleks seperti sengketa lahan, potensi konflik warga, maupun penanganan sampah liar dapat diselesaikan melalui satu forum koordinasi terpadu. Pendekatan ini menghemat waktu, mengurangi potensi miskomunikasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah di lapangan. Secara analitis, model kolaborasi ini menciptakan efisiensi struktural dan operasional sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap persepsi kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan publik.
3. Optimalisasi Anggaran Berbasis Skala Prioritas (*Value of Money*). Kecamatan Jatisampurna menerapkan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran dengan menitikberatkan pada ketepatan sasaran belanja. Efisiensi



tidak dilakukan melalui pemangkasan kegiatan strategis, melainkan melalui rasionalisasi belanja administratif, seperti pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis kantor (ATK) melalui digitalisasi proses kerja. Penghematan pada belanja operasional administratif tersebut kemudian dialihkan ke kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dengan total anggaran sebesar **Rp37.770.093.214**, pengelolaan dilakukan berbasis prioritas program yang memberikan kontribusi nyata terhadap indikator kinerja utama. Sebagai contoh, integrasi kegiatan dalam program Pesona memungkinkan beberapa layanan dilaksanakan secara terpadu dalam satu waktu dan lokasi. Pola ini mengurangi biaya sewa sarana prasarana serta konsumsi kegiatan, sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Secara analitis, pendekatan ini menghasilkan efisiensi biaya per unit layanan. Artinya, dengan pagu anggaran yang tersedia, Kecamatan mampu menghasilkan capaian kinerja termasuk peningkatan IKM yang melampaui target tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari efektivitas alokasi dan pengendalian anggaran, bukan semata karena besarnya pagu yang tersedia.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja Kecamatan Jatisampurna berdasarkan realisasi keuangan dan fisik kegiatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Output dan outcome yang ditargetkan dapat dicapai dengan tingkat realisasi yang tinggi, serta tidak terdapat hambatan signifikan yang



mengganggu pelaksanaan program. Keberhasilan tersebut didukung oleh kecukupan pendanaan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang konsisten sepanjang tahun anggaran berjalan. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring turut memastikan bahwa alokasi anggaran dapat dikonversi menjadi capaian kinerja yang terukur. Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai kapasitas fiskal dan dukungan pendanaan, berikut disajikan perbandingan pagu anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 beserta rinciannya:

Tabel 3.28 Perbandingan Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Per Program Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran			Persen (%)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.064.241.480	21.703.742.814	19.617.092.567	90,39
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	230.000.000	159.775.000	155.325.494	98,32
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.778.687.040	14.627.381.400	14.380.996.775	98,10
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	50.000.000	18.425.000	36,85
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.222.000.000	1.129.214.000	1.099.035.794	95,59
	Total	35.344.928.520	37.670.113.214	35.270.875.630	93,39

Sumber Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi siencang, 2025

Alokasi anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp35.344.928.520** dan setelah perubahan meningkat menjadi **Rp37.670.113.214**. Dari pagu anggaran setelah



perubahan tersebut, terealisasi sebesar **Rp35.270.875.630**, sehingga tingkat capaian realisasi anggaran mencapai **93,39%**. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal. Selisih antara pagu setelah perubahan dan realisasi mencerminkan adanya efisiensi maupun penyesuaian teknis dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan. Adapun capaian realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kolaborasi dengan unsur LKM

Tingginya tingkat realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh intensitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif. Partisipasi aktif 100% LKM meliputi RT/RW, LPM, BKM, Posyandu, dan PKK berperan signifikan dalam mempercepat pelaksanaan program di tingkat kelurahan dan lingkungan. Keterlibatan unsur LKM sebagai pelaksana sekaligus mitra pemerintah menciptakan mekanisme eksekusi program yang lebih responsif dan tepat sasaran. Dengan struktur organisasi yang telah melekat di masyarakat, proses distribusi informasi, mobilisasi partisipasi warga, hingga pengawasan kegiatan dapat dilakukan secara efektif tanpa memerlukan struktur tambahan. Secara analitis, kolaborasi ini menurunkan risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan daya serap anggaran, serta memperkuat akuntabilitas sosial. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tingginya realisasi keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas output dan outcome program pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi biaya operasional melalui digitalisasi



Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 1,52% yang dicapai pada tahun 2025, meskipun tingkat realisasi anggaran tidak mencapai 100%, menunjukkan adanya efisiensi kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak selalu bergantung pada maksimalisasi belanja, melainkan pada efektivitas pemanfaatan anggaran. Pemanfaatan aplikasi digital serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berkontribusi signifikan dalam memangkas biaya birokrasi, seperti penggunaan kertas, pencetakan dokumen, distribusi fisik berkas, dan waktu proses administrasi. Digitalisasi proses pelayanan mempercepat alur kerja, mengurangi potensi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi. Secara analitis, transformasi digital ini menghasilkan efisiensi biaya operasional sekaligus peningkatan kualitas pelayanan. Dengan biaya yang relatif lebih terkendali, Kecamatan tetap mampu menghasilkan outcome yang lebih tinggi, yang tercermin pada kenaikan IKM. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktivitas organisasi, yakni kemampuan menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan sumber daya yang sama atau lebih efisien.

3. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang efisien
Sisa anggaran sebesar kurang lebih 6,61% pada akhir Tahun Anggaran 2025 tidak mencerminkan kegagalan pelaksanaan program, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang prudent dan terkontrol. SILPA tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari strategi efisiensi yang terencana, bukan akibat kegiatan yang tidak terlaksana. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya SILPA tersebut antara lain:



- Efisiensi Pengadaan, yaitu adanya selisih harga hasil proses pengadaan barang dan jasa yang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan, tanpa mengurangi spesifikasi dan kualitas output kegiatan.
- Manajemen Pengeluaran Berbasis Prioritas, yakni penerapan seleksi yang ketat terhadap kegiatan pendukung yang dinilai memiliki dampak tidak langsung terhadap output prioritas daerah, khususnya dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

4. Masa transisi Perencanaan

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Jatisampurna berada pada fase transisi menuju implementasi Renstra 2025–2029. Dalam konteks tersebut, dilakukan proses sinkronisasi dan penyesuaian anggaran secara hati-hati pada akhir tahun anggaran untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keselarasan arah pembangunan. Penyesuaian ini bertujuan untuk menghindari potensi tumpang tindih pendanaan, khususnya antara program penanganan stunting yang bersumber dari pemerintah pusat dan program intervensi yang didanai melalui APBD. Dengan melakukan harmonisasi perencanaan sejak awal masa transisi, Kecamatan memastikan bahwa setiap intervensi bersifat komplementer, bukan duplikasi. Secara analitis, langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) sekaligus penguatan integrasi perencanaan lintas level pemerintahan. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan keberlanjutan program prioritas daerah dalam kerangka Renstra 2025–2029.



**Tabel 3.29 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna**

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran		Keterangan
			Rp.	(%)	
Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.703.742.814	19.617.092.567	90,39	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.750.806.000		89,5	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.747.806.000	14.988.823.863	89,5	Penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah pegawai ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.900.000	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53.900.000	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.991.900	397.141.748	81,38	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	16.983.555	84,92	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.864.672	267.159.470	97,55	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.677.228	51.844.233	98,42	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	18.084.000	90,42	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	0	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.450.000	38.630.500	58,13	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penataan Arsip di Kecamatan Jatisampurna	5.000.000	4.440.000	88,8	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.576.000	20.912.400	92,63		

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.576.000	20.912.400	92,63	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.718.768.914	3.628.876.948	97,58	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	199.802.222	99,9	Realisasi kinerja dilaksanakan sesuai target, jumlah tagihan dibayarkan setiap bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.518.768.914	3.429.074.726	97,45	Penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah pegawai Tahun 2024 hasil rekonsiliasi dengan Bagian BPKAD dan beserta pegawai disesuaikan dengan pendidikannya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.700.000	575.337.608	86,3	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000	83.850.350	88,26	Realisasi kinerja dilaksanakan sesuai target, service dan pembelian bahan pelumas serta pembayaran pajak kendaraan Dinas Camat dan Sekcam
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	250.000.000	172.967.038	69,19	Realisasi kinerja dilaksanakan sesuai target, service dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kecamatan Jatisampurna
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	42.221.040	98,19	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.700.000	276.299.180	99,14	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	159.755.000	155.325.494	98,32	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	148.415.000	144.098.901	97,63	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	48.415.000	45.902.616	94,81	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisampurna)	20.000.000	19.693.853	98,47	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiraden)	20.000.000	19.799.958	99	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirangga)	20.000.000	19.752.463	98,76	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiranggon)	20.000.000	19.941.805	99,71	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatikarya	20.000.000	19.008.206	95,04	Penyerapan anggaransesuai dengan kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.340.000	11.226.593	99	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	11.340.000	11.226.593	99	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	18.425.000	36,85	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	18.425.000	36,85	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	18.425.000	36,85	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.727.381.400	14.380.996.775	98.10	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	14.477.381.400	14.130.996.755	96.40	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	120.000.000	110.936.000	92,45	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.000.000	82.212.555	70,87	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	3.600.022.200	3.526.551.600	97,96	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	2.182.643.800	2.171.242.600	99,48	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	2.634.306.400	2.553.706.800	99,64	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	2.152.659.000	2.135.454.400	99,2	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	2.521.750.000	2.450.892.800	97,19	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatisampurna	200.000.000	200.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiraden	200.000.000	200.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatirangga	200.000.000	200.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiranggon	300.000.000	300.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatikarya	200.000.000	200.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	0	0	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.000.000	250.000.000	99,8	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	49.140.000	98,94	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiraden	40.000.000	40.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatisampurna	40.000.000	40.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatirangga	40.000.000	40.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiranggon	40.000.000	40.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatikarya	40.000.000	40.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	64.814.000	48.140.000	74,27	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	276.400.000	270.895.794	98,01	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatisampurna)	192.000.000	186.000.000	96,88	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiraden)	156.000.000	156.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatirangga)	150.000.000	150.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiranggon)	180.000.000	180.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatikarya)	108.000.000	108.000.000	100	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sumber Data: Siencang e-monev Kecamatan Jatisampurna, 2025



Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.30 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET	Realisasi		KENDALA
		Rp.	(%)	
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.703.742.814	19.617.092.567	90,39	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.750.806.000		89,5	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.747.806.000	14.988.823.863	89,5	Realisasi sudah sesuai dengan target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.900.000	0	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53.900.000	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.991.900	397.141.748	81,38	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	16.983.555	84,92	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.864.672	267.159.470	97,55	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.677.228	51.844.233	98,42	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	18.084.000	90,42	Realisasi sudah sesuai dengan target
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	0	Karena tidak ada tamu dari luar Kota Bekasi yang berikunjung

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.450.000	38.630.500	58,13	Rendahnya realisasi pada sub kegiatan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena adanya beberapa belanja BBM dan SPPD yang tidak diserap
Penataan Arsip di Kecamatan Jatisampurna	5.000.000	4.440.000	88,8	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.576.000	20.912.400	92,63	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.576.000	20.912.400	92,63	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.718.768.914	3.628.876.948	97,58	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	199.802.222	99,9	Pembayaran belanja Listrik gedung kantor kecamatan dan 5 kelurahan serta biaya internet dibayarkan sudah sesuai dengan tagihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.518.768.914	3.429.074.726	97,45	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.700.000	575.337.608	86,3	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000	83.850.350	88,26	Tidak terserapnya sisa pagu disebabkan oleh bukti pembelian BBM/Struk yang menjadi dokumen SPJ tidak terpenuhi secara keseluruhan.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	250.000.000	172.967.038	69,19	Tidak terserapnya sisa pagu disebabkan oleh bukti pembelian BBM/Struk yang menjadi dokumen SPJ tidak terpenuhi secara keseluruhan.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	42.221.040	98,19	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.700.000	276.299.180	99,14	Realisasi sudah sesuai dengan target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	159.755.000	155.325.494	98,32	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	148.415.000	144.098.901	97,63	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	48.415.000	45.902.616	94,81	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing-masing

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisampurna)	20.000.000	19.693.853	98,47	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing - masing
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiraden)	20.000.000	19.799.958	99	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing - masing
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirangga)	20.000.000	19.752.463	98,76	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing - masing
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiranggon)	20.000.000	19.941.805	99,71	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing - masing
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatikarya	20.000.000	19.008.206	95,04	Realisasi sudah sesuai dengan alokasi anggaran, Kelurahan untuk giat K3 dan Grebek K3 di wilayah masing - masing
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.340.000	11.226.593	99	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	11.340.000	11.226.593	99	Realisasi sudah sesuai dengan target
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	18.425.000	36,85	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	18.425.000	36,85	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	18.425.000	36,85	Beberapa rapat koordinasi dilaksanakan secara internal dan tidak memerlukan biaya besar (tanpa sewa tempat, konsumsi minimal, dll).
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.727.381.400	14.380.996.775	98.10	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.477.381.400	14.130.996.755	96.40	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	120.000.000	110.936.000	92,45	Realisasi sudah sesuai dengan target

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.000.000	82.212.555	70,87	Kegiatan ditujukan untuk memberikan uang saku, honor dan/atau bantuan operasional serta pembayaran BPJS kematian dan kecelakaan kerja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	3.600.022.200	3.526.551.600	97,96	Realisasi sudah sesuai dengan target, pembayaran honorarium masyarakat sudah sesuai dengan alokasi anggaran kas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	2.182.643.800	2.171.242.600	99,48	Realisasi sudah sesuai dengan target, pembayaran honorarium masyarakat sudah sesuai dengan alokasi anggaran kas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	2.634.306.400	2.553.706.800	99,64	Realisasi sudah sesuai dengan target, pembayaran honorarium masyarakat sudah sesuai dengan alokasi anggaran kas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	2.152.659.000	2.135.454.400	99,2	Realisasi sudah sesuai dengan target, pembayaran honorarium masyarakat sudah sesuai dengan alokasi anggaran kas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	2.521.750.000	2.450.892.800	97,19	Realisasi sudah sesuai dengan target, pembayaran honorarium masyarakat sudah sesuai dengan alokasi anggaran kas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatisampurna	200.000.000	200.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiraden	200.000.000	200.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatirangga	200.000.000	200.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiranggon	300.000.000	300.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatikarya	200.000.000	200.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	0	0	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.000.000	250.000.000	99,8	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	49.140.000	98,94	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiraden	40.000.000	40.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target

Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Jatisampurna
Tahun 2025



Penyelenggaraan Kemasyarakatan di Jatisampurna	Lembaga Kelurahan	40.000.000	40.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyelenggaraan Kemasyarakatan di Jatirangga	Lembaga Kelurahan	40.000.000	40.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyelenggaraan Kemasyarakatan di Jatiranggon	Lembaga Kelurahan	40.000.000	40.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Penyelenggaraan Kemasyarakatan di Jatikarya	Lembaga Kelurahan	40.000.000	40.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.127.214.000	1.099.035.794	95,59	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		64.814.000	48.140.000	74,27	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)		276.400.000	270.895.794	98,01	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatisampurna)		192.000.000	186.000.000	96,88	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiraden)		156.000.000	156.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatirangga)		150.000.000	150.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiranggon)		180.000.000	180.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatikarya)		108.000.000	108.000.000	100	Realisasi sudah sesuai dengan target

Secara keseluruhan realisasi anggaran Tahun 2025 telah tercapai **Rp35.270.345.886,00** atau sebesar **93,39%** dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar



Rp37.768.093.214,00. Dari 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, terdapat 5 (lima) sub kegiatan yang realisasi belanjanya di bawah 80%. Adapun penjelasan atas hambatan dan kendala pencapaian target tidak mencapai 80% sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu anggaran sebesar Rp66.450.000,00 terealisasi Rp38.630.500,00 atau 58,13% karena terdapat efesiensi dalam belanja perjalanan dinas.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu anggaran sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp172.967.038.000,00 atau 69,19%. Belanja sudah sesuai dengan kebutuhan
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pagu anggaran sebesar Rp116.000.000,00 terealisasi Rp82.212.555,00 atau 70,87%. Belanja tersebut berdasarkan hasil negosiasi di dalam e-purchasing dan terdapat kegiatan berupa lomba, namun lomba tersebut tidak dilaksanakan
4. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan pagu anggaran sebesar Rp64.814.000,00 terealisasi Rp48.140.000,00 atau 74,27%. Belanja tersebut berdasarkan hasil negosiasi di dalam e-purchasing.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.425.000,00 atau 36,85%. Terdapat kegiatan yang hanya dilakukan beberapa kali, karena kurang memahami proses pengadaan melalui e-purchasing.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025 merupakan representasi akuntabilitas kinerja dalam konteks masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2025 menjadi periode krusial karena berada pada irisan antara berakhirnya dokumen perencanaan sebelumnya dan dimulainya kerangka pembangunan jangka menengah yang baru. Secara umum, Kecamatan Jatisampurna mampu menjaga kesinambungan kinerja antara target yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026 (periode RPD) dengan arah kebijakan dan indikator strategis dalam Renstra 2025–2029 (periode RPJMD). Konsistensi ini tercermin dari tercapainya indikator kinerja utama tanpa terjadi stagnasi maupun penurunan capaian selama masa transisi. Selain menjaga keberlanjutan, Kecamatan juga melakukan akselerasi terhadap indikator prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan daerah, sehingga transisi perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan penguatan kualitas kinerja secara substansial.

Keberhasilan tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Transisi (Renstra 2024-2026)

Dalam fase transisi perencanaan, Kecamatan Jatisampurna berhasil mempertahankan tren positif pada indikator makro pelayanan dan akuntabilitas, yang menunjukkan stabilitas tata kelola pemerintahan:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Realisasi mencapai **75,95** dari target **75,70**. Capaian ini mengindikasikan penguatan budaya kinerja serta peningkatan



kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang semakin berorientasi pada hasil (result-oriented government). Nilai tersebut juga mencerminkan konsistensi dalam pengendalian program dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Mencapai **86,72** dari target **85,42**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui standar yang ditetapkan. Secara substantif, kenaikan IKM mencerminkan peningkatan persepsi masyarakat terhadap aspek kecepatan layanan, kejelasan prosedur, serta responsivitas aparatur.
3. Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Tercapai 84% sesuai target 54%. Hal ini menunjukkan stabilitas kondisi ketenteraman dan ketertiban umum tetap terjaga sesuai perencanaan. Konsistensi capaian pada indikator ini menegaskan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah.

B. Capaian Kinerja Strategis Baru (Renstra 2025-2029)

Sebagai bagian dari transformasi tata kelola pada periode Renstra 2025–2029, Kecamatan Jatisampurna mulai menguatkan indikator berbasis partisipasi masyarakat dan outcome pelayanan.

1. Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik Mencapai 100% dari target 62.5%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan mobilisasi dan pemberdayaan RT/RW, LPM, BKM, PKK, dan Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah. Keaktifan penuh LKM meningkatkan akurasi data serta efektivitas intervensi dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, sehingga program lebih tepat sasaran
2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Terealisasi sebesar 1,52% dari target 0,06%, atau lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan. Realisasi ini mengindikasikan bahwa inovasi pelayanan yang dilakukan memberikan dampak



nyata dalam waktu relatif singkat. Peningkatan tersebut menegaskan bahwa strategi akselerasi pelayanan dan optimalisasi sumber daya berjalan efektif pada tahun pertama implementasi Renstra baru

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2019 adalah tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

- 1) LKIP Kecamatan Jatisampurna merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Jatisampurna agar terjalin komunikasi yang baik;
- 2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Jatisampurna agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 4) Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.



Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029 serta Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang